



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG ABUNG BARAT**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025 (AUDITED)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU)**

**Jl. Letkol Pol Toegino
Kuala Tungkal**

KABUPATEN TANJUNG ABUNG BARAT

JALAN LETKOL POL. TOEGINO NO. 100

KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kuala Lumpur, 04 Mei 2025
Kantor Pengantar Anggaran
Sekretaris KPU
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
SEKRETARAT
NITHINO, E.M.S.A.P
Penerima N.
NIP. 197006191997021001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Pernyataan Tanggung Jawab	6
Ringkasan	7
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran dan Daftar	62

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Rincian Pendapatan Dan Jenis Belanja Semester II Tahun Anggaran 2025	33
Tabel 2 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak	34
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025	34
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 dan 2024	35
Tabel 5 Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan TA 2024	36
Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2025 dan TA 2024	37
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024	37
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan 2024	38
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Covid-19 Semester II TA 2025 dan 2024	38
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan 2024	39
Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	39
Tabel 12 Rincian Kas Lainnya dan Selara Kas	40
Tabel 13 Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024	41
Tabel 14 Rincian Bagian Lancar TP/TGR Semester II TA 2025 dan 2024	41
Tabel 15 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Semester II TA 2025	42
Tabel 16 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) TA 2025 dan 2024	42
Tabel 17 Rincian Persediaan	43
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	45
Tabel 19 Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Semester II TA 2025 dan 2024	45
Tabel 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) TA 2025 dan 2024	46
Tabel 21 Rincian Aset Tak berwujud	47
Tabel 22 Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	48
Tabel 23 Rincian Pendapatan PNBP-LD TA 2025 dan 2024	50
Tabel 24 Rincian Beban Pegawai pada Semester II TA 2025 dan 2024	51
Tabel 25 Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan 2024	51
Tabel 26 Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 dan 2024	52
Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan 2024	52
Tabel 28 Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 dan 2024	53

Tabel 29 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

	<i>Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024</i>	54
Tabel 30	<i>Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2025 dan TA 2024</i>	54
Tabel 31	<i>Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 dan 2024</i>	55
Tabel 32	<i>Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2025 dan 2024</i>	56
Tabel 33	<i>Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2025 dan 2024</i>	56
Tabel 34	<i>Rincian Pos Luar Biasa Semester II TA 2025 dan 2024</i>	58
Tabel 35	<i>Nilai Persediaan Semester II TA 2024</i>	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jln. Laskar Toegno – Kuala Tungkal Telp. (0742) 323598 / Fax. (0742) 323598

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tingkat Satker yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Tungkal, 04 Mei 2026
Ketua Pengantar Anggaran
Sekretaris KPU
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SUTRISO S.Pd.S.AP
Pengantar Tk. I
NIP. 197006191997021001

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 173.029.138,- yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp.6.153.073.707,- atau mencapai 99,13 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.207.115.000,- .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II TA 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.762.714.635,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-. Nilai Kewajiban sebesar Rp.0,- dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 762.714.635,-. Sehingga Nilai Kewajiban dan Ekuitas Sebesar Rp. 762.714.635,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban adalah sebesar Rp. 6.629.784.080, surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. (6.629.784.080), surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,- sehingga terdapat

Surplus/Defisit Pelepasan Aset senilai Rp. 114.664.800,- dan terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp. 429.101.132,- Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp. (6.200.682.948),- , Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp. (6.200.682.948),- dan sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (6.200.682.948),-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.7.729.398.671,- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.6.200.682.948),- ditambah dengan koreksi-yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp. (4.660.263.493),- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.3.894.262.405,- terjadi Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp.(6.966.684.036),- sehingga Ekuitas akhir pada Semester I TA 2025 unaudited adalah senilai Rp.762.714.635,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JAHUNG BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TA 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% Realisasi	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.1	-	170.029.138	0,00	170.136.464
Jumlah PENDAPATAN		-	170.029.138	0,00	170.136.464
BELANJA	8.2				
Belanja Pegawai	8.3	1.775.067.000	1.778.258.473	99,95	1.881.384.503
Belanja Barang	8.4	1.382.270.000	1.331.714.380	97,88	84.134.629.294
Belanja Modal	8.5	49.788.000	48.300.085	96,91	357.530.718
PENDAPATAN DAN HIBAH	8.6				
Belanja Hibah		-	-	0,00	-
Jumlah BELANJA		3.207.115.000	3.158.272.938	98,13	47.283.534.511

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NERACA PER SEMESTER II TA 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	6.746.045.657
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	-	202.500.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.4	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Persediaan		-	-
JUMLAH ASET LANCAR		-	6.948.545.657
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.7	3.379.826.917	3.077.154.916
Akumulasi Penyusutan	C.8	(2.611.112.262)	(2.264.442.352)
JUMLAH ASET TETAP		762.714.635	752.712.564
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	-	444.414.104
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	-	(444.414.104)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		762.714.635	7.741.258.221
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	-	11.858.550
Utang Muka dari KPPN	C.12	-	-
Utang Yang Belum Di Tagihkan	C.13	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	11.858.550
JUMLAH KEWAJIBAN		-	11.858.550
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	762.714.635	7.729.399.671
JUMLAH EKUITAS		762.714.635	7.729.399.671
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		762.714.635	7.741.258.221

LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TA 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Koreksi/ (Penurunan)
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	269.768.062	(269.768.062)
Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	0	269.768.062	(269.768.062)
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	3.791.399.822	2.696.962.867	875.347.705
Beban Persediaan	-	2.691.962.799	(2.691.962.799)
Beban Barang dan Jasa	2.127.621.556	39.319.371.767	(37.191.750.211)
Beban Pemeliharaan	48.165.039	60.413.649	(12.448.607)
Beban Perjalanan Dinas	365.927.739	3.004.614.256	(2.638.686.517)
Beban Daring untuk Pemilihan Kepala Masyarakat	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	326.609.910	287.766.189	38.843.741
Beban Penyusutan Pustaka Tak Yektif	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
Jumlah Beban Operasional	6.429.714.886	48.349.489.729	(41.919.705.844)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(6.429.714.886)	(47.979.721.672)	41.349.947.892
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	114.634.800	300.300	
Pendapatan Pelepasan Aset	114.634.800	300.300	114.334.500
Beban Pelepasan Aset	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	314.436.332	117.921.386	(196.515.226)
Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	314.436.332	122.886.106	191.549.226
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	4.964.720	(4.964.720)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	428.872.664	117.921.386	310.951.278
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(6.000.842.222)	(47.861.442.286)	41.860.604.318
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.000.842.222)	(47.861.442.286)	41.860.604.318

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TA 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	Jumlah
EKUITAS AWAL	7.729.398.671	26.669.056.526	(18.939.657.855)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.200.632.948)	(47.861.442.266)	41.660.759.318
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEHLIAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4.660.263.493)	-	(4.660.263.493)
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Pemecatan	-	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-	-
Lain-lain	(4.660.263.493)	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	3.894.262.405	28.921.756.411	(25.027.494.006)
Penghasilan Pengembalian Filial Langsung	-	-	-
Setoran Surplus ELU	-	-	-
KERAIKAN/(PESURUBAN) EKUITAS	(6.966.634.036)	(18.939.657.855)	11.973.023.819
EKUITAS AKHIR	762.714.635	7.729.398.671	(6.966.684.036)

**Profil dan
Fungsi****A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Sesuai dengan maksud UUD 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Amanat konstitusi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga non struktural adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat provinsi secara hierarkis bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkedudukan di Jalan Beringin Kuala Tungkal Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Bagian Ketiga pasal 2 mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjelaskan secara umum tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu KPU RI untuk melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU RI di wilayah kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya:

1. Menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Umum (Pemdu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di wilayah kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Menyelenggarakan Pemdu Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
3. Menyelenggarakan Pemdu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih. Pada Pasal 11 disebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara pada Pasal 13 disebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Untuk mewujudkan KPU sebagai lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) KPU tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset Kepemilihan
 - b. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi
 - d. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - e. Opini BPK atas Laporan Keuangan.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/Pemilihan
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap
 - e. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.
 - b. Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.

A.1.1 Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten, sedangkan dalam Pasal 10 dan Lampiran 1 dijelaskan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota yang keanggotaannya disahkan dengan Keputusan KPU RI. Lima anggota ini terdiri atas Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota, yang pada periode 2023-2028 susunan keanggotaannya sebagaimana keputusan KPU RI No. 614 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2023-2028 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Muhammad Rum, SH
- b. Anggota : M. Ilyas, S.Kom.I
Munawir Sazali, S.Pd.I
Fadlan Habibi, S.Hul
Ronol Pasmah, SH

Selanjut pembagian divisi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 256 TAHUN 2023 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Ketua Divisi : Muhammad Rum, SH
Wakil Divisi : Ronal Pasmah, SH
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
Ketua Divisi : Munawir Sazali, S.Pd.I
Wakil Divisi : Muhammad Ilyas, S.Kom.I

c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Ketua Divisi : Muhammad Idris, S.Kom.I

Wakil Divisi : Padlan Habibi, S.Hut

d. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Ketua Divisi : Padlan Habibi, S.Hut

Wakil Divisi : Muhammad Rumi, SH

e. Divisi Hukum dan Pengawasan

Ketua Divisi : Ronal Pasrah, SH

Wakil Divisi : Munawir Sazali, S.PdI



Gambar 1.1 Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2023 - 2028

Untuk pembagian susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 257 TAHUN 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2023-2028, sebagai berikut:

- a. Koordinator Wilayah (Korwil) Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Ram dan Kec. Seberang Kota
Ketua Korwil : Muhamma Rum, SH
Wakil Korwil : Paddan Habibi, S.Hut
- b. Koordinator Wilayah (Korwil) Kec. Betara dan Kec. Kuala Betara
Ketua Korwil : Paddan Habibi, S.Hut
Wakil Korwil : M. Ilyas, S.Kom.I
- c. Koordinator Wilayah (Korwil) Kec. Pengabuan dan Kec. Senyerang
Ketua Korwil : M. Ilyas, S.Kom.I
Wakil Korwil : Muhamma Rum, SH
- d. Koordinator Wilayah (Korwil) Kec. Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu dan Kec. Batang Asam
Ketua Korwil : Rival Pansah, SH
Wakil Korwil : Munawir Sarali, S.Pd.I
- e. Koordinator Wilayah (Korwil) Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, dan Kec. Renah Mendaluh
Ketua Korwil : Munawir Sarali, S.Pd.I
Wakil Korwil : Rival Pansah, SH

A.1.2 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenanganya, KPU Kabupaten dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat ini di Jabut oleh Sutrisno, S.Pd.S.AP. Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bantu oleh empat bagian dan 4 Sub bagian. Dapat dilihat pada gambar Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bawah ini:

Tujuan, sebagai berikut:

Visi Komisi Pemilihan Umum

"Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, Profesional, dan Berintegritas."

Misi Komisi Pemilihan Umum

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2021-2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta akseptabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, adapun Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan

- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2025, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu efisien dan efektif", yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluwan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluwan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik".

A.1.4 Nilai-nilai Dasar dan Lingkup Tugas KPU

Sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban, segempai jajaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengemban nilai-nilai dasar yaitu: integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel

1. **Memiliki Integritas.** Segempai personal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik komisiner maupun sekretariat harus memiliki integritas yang tinggi dalam mengemban tugasnya. Hal ini terkait dengan peran KPU yang merupakan gerbang dalam rangka mencari sosok pemimpin nasional dan wakil rakyat yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan akseptabilitas serta merupakan kunci pertama untuk mencari kepemimpinan nasional yang bertanggung jawab terhadap amanah yang diembarkannya.
2. **Profesional.** Seluruh jajaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara komisiner dan berkeharapan terus berbenah diri dengan berbagai upaya yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personal, peningkatan kualitas SDM, dan pemberaian dalam rekrutmen untuk menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berkualitas.
3. **Mandiri.** Dalam alam demokrasi yang terus berkembang menuntut penyelenggaraan pemilu yang mandiri, artinya bebas dari intervensi politik dan pemerintahan. Proses pemerintahan diharapkan berjalan tanpa dipengaruhi oleh atau dimanipulasi untuk kepentingan pemenangan Pemilu. Pernyataan ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab II, Pasal 3 yang menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien".

4. **Transparan.** KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan segera/jajarannya telah bertekad untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik yang membutuhkan mengenai semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
5. **Akuntabel.** Seluruh proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Penyusunan
Pengantar
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengalihan/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengolahan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Pinang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah III pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek (BJJ) dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah diberikannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini disesuaikan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Urutan	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Perjanjian Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharuan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA,
- Nilai Persediaan dikalaf berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaliryan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digurakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/EMD.

Pengusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat diusulkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Pengelompokan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Cedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Semi Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan 01 Januari s/d 31 Desember Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan revisi RPK sebanyak 6 (Enam), Revisi Tingkat DIPA dan revisi DIPA dari pusat sebanyak 7 (Tujuh) kali pada TA 2025. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Pendapatan Dan Jenis Belanja
Semester II Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025	
	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	0	173.029.132
Jumlah Pendapatan	-	173.029.132
Belanja		
Belanja Pegawai	3.775.067.000	3.775.269.873
Belanja Barang	2.380.370.000	2.331.714.000
Belanja Modal	49.788.000	49.930.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	6.205.225.000	6.156.913.873

Realisasi

Pendapatan

Rp.173.029.132,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp.173.029.132,- yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam DIPA Tahun 2025. Pendapatan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pendapatan lain-lain sebesar Rp.173.029.132,- bersumber dari Lelang BMN Eks Pemilu Tahun 2024 Sebesar Rp. 106.752.600,- dengan Rinalah Lelang Nomor 174/04.01/2025-01 Tanggal 27 Mei 2025 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 berupa Pengembalian Perjalanan Dinas An. Sarwani dan An. Reno Rina Mizarni ke Jambi Sebesar Rp. 1.080.000,-, Pengembalian Operasional PPK Kecamatan Batang Asam Sebesar Rp. 5.072.274,-, Pengembalian Perjalanan

Dinas Dalam Kota An. Padlan Habibi, An. Nantik Musthof, An. Muhammad Satri dan An. Sudarmadi Ke Kecamatan Berau Item Sebesar Rp. 600.000,- dan Pengembalian Perjalanan Dinas Ke Jakarta An. Muhammad Rum dan An. Padlan Habibi sebesar Rp. 200.000,- dan Pengembalian Biaya Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon pada Media Online Sebesar Rp. 1.400.000,-, Pengembalian Biaya BBM pada Kegiatan Pengawasan Polres sebesar Rp. 1.000.000,-, Pengembalian Biaya Pembelian Paket Internet KPPS untuk Sikrap Pemilihan Serentak Tahun 2024 Sebesar Rp. 21.375.000,-, Pengembalian Kelebihan Pembelian ATK Sebesar Rp. 1.383.758,- dan Pengembalian Pembelian Konsumsi Sebesar Rp. 603.300,- bersumber dari Lelang BMN Eas Pertama Tahun 2024 Sebesar Rp. 8.912.200,- dengan Risalah Lelang Nomor 315/04.01/2025-01 Tanggal 27 Agustus 2025, Pengembalian kelebihan pencatatan pembayaran Honorarium Sekretariat PPK bulan OKTOBER 2024 sesuai kuitansi nomor 00807/KWHB/686443/2024 tanggal 25 November 2024 sebesar Rp. 25.600.000,-.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak

No.	Nilai	Keterangan
1	Rp. 1.000.000	Pengambilan Belanja Perjalanan Dinas An. Sorwani dan Rono Hary Muzani Ke Jambi
2	Rp. 5.072.274	Pengambilan Belanja Operasional PTK Kecamatan Hutang Asam
3	Rp. 800.000	Pengambilan Belanja Perjalanan Dinas An. Muhammad Rum, Padlan Habibi Ke Jakarta dan Padlan Habibi Nantik Musthof, Muhammad Rum, Sudarmadi ke Kecamatan Berau Item
4	Rp. 1.400.000	Pengambilan Biaya Pengumuman Pendaftaran Calon pada Media Online
5	Rp. 1.000.000	Pengambilan Biaya BBM pada Kegiatan Pengawasan Polres
6	Rp. 21.375.000	Pengambilan Biaya Pembelian Paket Internet KPPS untuk Sikrap Pemilihan Tahun 2024
7	Rp. 1.383.758	Pengambilan Kelebihan Pembelian ATK
8	Rp. 603.300	Pengambilan pembelian konsumsi
9	Rp. 106.752.600	Hasil Bersih Lelang dengan Nomor Risalah 174X04.01/2025
10	Rp. 8.912.200	Hasil Bersih Lelang dengan Nomor Risalah 315X04.01/2025
11	Rp. 25.600.000	Pengambilan kelebihan pencatatan pembayaran Honorarium Sekretariat PPK bulan Oktober
	Rp173.029.132	

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp 6.153.073.701,- atau 99,13% dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.207.115.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Semester II TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	3.773.067.000	3.773.259.066	99,95
Belanja Barang	2.392.270.000	2.391.714.350	97,88
Belanja Modal	42.768.000	42.100.005	98,41
Pinjaman dan Hibah			
Belanja Lain-lain	-	-	-
Jumlah	6.207.115.000	6.153.073.701	99,13

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar (0,02)% dibandingkan realisasi belanja pada Semester yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja
Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	REALISASI Semester II TA 2025	REALISASI Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	3.773.259.066	3.861.364.937	30,95
Belanja Barang	2.391.714.350	44.134.839.264	(94,72)
Belanja Modal	42.100.005	267.370.710	(87,00)
Pinjaman dan Hibah			
Belanja Lain-lain	-	-	-
Jumlah	6.153.073.701	47.263.554.911	(94,89)

**Belanja
Pegawai**

Rp.3.773.259.366,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing sebesar Rp.3.773.057.000,- dan Rp.3.773.259.366,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,68 % persen dari TA 2024, dikarenakan adanya CPNS, Kenaikan Pangkat, Pembayaran THR, dan Pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Komisiner yang dibayarkan Pada Periode Pelaporan ini.

Tabel 5
Perbandingan Belanja Pegawai
Semester I TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SEM I TA 2025	REALISASI SEM I TA 2024	Rasio (Persen %)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS/PPK			
Belanja Gaji Pokok PNS/PPK	1.175.655.355	843.118.750	50%
Belanja Penjualan Gaji PNS/PPK	15.312	1.340	30%
Belanja Tunj. Suksesi PNS PPK	82.885.825	84.581.680	29%
Belanja Tunj. Anak PNS/PPK	24.876.543	20.843.818	21%
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.325.000	40.325.000	0%
Belanja Tunj. PPh PNS/PPK	61.177.105	27.000.000	127%
Belanja Tunj. Biaya PNS/PPK	67.193.880	5.008.540	1236%
Belanja Uang Makan PNS/PPK	251.466.100	48.173.180	371%
Belanja Tunjangan Umum PNS	38.050.000	115.810.000	-66%
Belanja Uang Lembor	15.200.000	0	0%
Belanja Uang Kehormatan	827.810.000	852.037.254	0%
Belanja Tunj. Fungsional PPK	53.280.000	23.285.000	129%
Belanja Tunjangan Khusus/Kepala	1.156.855.341	843.035.500	0%
Jumlah Belanja Kotor	3.773.218.366	2.881.284.887	30,66%

Belanja

Barang Rp

2.331.714.330,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 sebesar Rp. 2.331.714.330,- dan Rp. 44.134.629.294,-. Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Rp. 2.331.714.330,- atau 96,94 persen dari Anggaran Rp.2.415.290.000,-. Realisasi Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri.

Berdasarkan Tabel 6, Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 mengalami Penurunan sebesar (2,73)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2025 pada semester yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran Tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pada TA tahun 2025.

Tabel 6
Perbandingan Belanja Barang
Semester I TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Semester I TA 2025	REALISASI Semester I TA 2024	Perubahan %
Belanja Barang Operasional	118.732.283,-	200.618.069,-	-41%
Belanja Barang Non Operasional	1.090.577.833,-	27.591.843.130,-	-96%
Belanja Pemeliharaan	0,-	2.411.699.183,-	0%
Belanja Jasa	154.611.672,-	58.663.449,-	130%
Belanja Pemeliharaan	46.103.250,-	5.171.270.127,-	-99%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	362.677.730,-	900.644.167,-	-59%
Jumlah Belanja Kotor	2.331.714.330,-	44.134.629.294,-	-93%
Penghapusan Belanja	-	-	0%
Jumlah Belanja Bersih	2.331.714.330,-	44.134.629.294,-	-93%

Belanja Modal

Rp 48.100.005,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.100.005,- dan Rp. 265.570.710,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada belanja modal terdapat ketidaksesuaian akun vs kode barang aset sejumlah 4 transaksi dengan nilai total Rp 7.500.004 ketidaksesuaian tersebut terjadi karena penggunaan kode akun belanja modal aset berupa peralatan dan mesin (532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin) untuk belanja dibawah nilai kapitalisasi, belanja modal pada semester II Tahun 2025 berdasarkan Jurnal KPU RI Nomor 2841/PJ/01.6-SD/05/2025.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN RINCI BELANJA	REALISASI Semester II TA 2025	REALISASI Semester II TA 2024	Revisi (Tahun) %
Belanja Modal Tanah			0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.100.005	267.570.710	5,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
Belanja Modal Lainnya			
Jumlah Belanja Kotor	48.100.005	267.570.710	5,56
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	48.100.005	267.570.710	5,56

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.48.100.005,- dan Rp.267.570.710,-. Tidak Dianggarkannya Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Tahun 2024 sampai dengan Semester II Tahun 2025.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Semester II TA 2024 dan 2024

URAIAN	REALISASI Semester II TA 2025	REALISASI Semester II TA 2024	REVISI (Tahun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.100.005	267.570.710	
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Upah dan Biaya Pengadaan Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Perawatan Peralatan dan Mesin	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	48.100.005	267.570.710	
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	48.100.005	267.570.710	

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi Covid-19 gedung dan bangunan per Semester II TA 2025 dan Semester II 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.100.005,- dan Rp.267.570.710,-. Tidak Dianggarkannya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19 dari Tahun 2024 sampai dengan Semester II Tahun 2024.

Tabel 9

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Paralel dan Misi
Pencegahan Covid-19
Semester II TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI Semester II TA 2025	REALISASI Semester II TA 2024	SIK (TURUN) %
Belanja Modal Perlatan dan Misi	0	0	0%
Belanja Modal Bahan Baku Perlatan dan Misi	0	0	0%
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Perlatan dan Misi	0	0	0%
Belanja Modal Peralatan Perlatan dan Misi	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0%
Pengembalian	0	0	0%
Jumlah Belanja	0	0	0%

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan periode Semester II TA 2025 dan Semester II 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Tidak Dianggarkannya Belanja Modal Gedung dan Bangunan di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2025 sampai dengan Semester II TA 2024.

Tabel 10
*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester II TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Semester II TA 2025	REALISASI Semester II TA 2024	SIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan			0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per Semester II TA 2025 dan Semester II 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Tidak Dianggarkannya Belanja Modal Lainnya di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2025 sampai dengan Semester II TA 2024.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Semester II TA 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	T.A. 2023	T.A. 2024
1	Bank BPD Cabang Jambi	-	-
2	uang Tunai	-	-
3	Uang Yang belum di GUP kan	-	-
	Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp 0,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Semester II TA 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu Belanja Hibah berupa uang muka dan Kas Tunai Belanja Hibah dan ada pengembalian dana yang sudah disetor.

Tabel 12
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	TA 2023	TA 2024
1	Jasa Gizi yang belum di setor ke kas negara	-	-
2	Pajak yang belum Disetor ke Kas Negara	-	-
3	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	-	-
4	Saldo Kas Tunai di PDH	-	-
5	Hibah Yang Belum Disetor	-	-
6	Saldo Kas Bank Pada Hibah PDH dan PDH	-	-
	Jumlah	-	-

Belanja Dibayar di
Muka (prepaid)
Rp.0,-

C.3 Belanja Dibayar di Muka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Kendaraan	-	-
Pembayaran Sewa Gasing Logistik A	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Logistik B	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.0,-

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Semester II TA 2025 dan 2024

No	Satker	SMT II TA 2025	Tahun 2024
1	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Semester II TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Craguhan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
(Netto) Rp 0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

Sekelompok Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) per Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto) yang belum diselesaikan pada tanggal Neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto) adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)
TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
DGR wp	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp.0

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per Semester II TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Persediaan

No	Persediaan	Semester II TA 2025	TA 2024
1	Barang Konsumsi	-	-
2	Barang untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Barang Persediaan Lainnya Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
5	Bahan Baku	-	-
Jumlah		-	-

Berdasarkan berita acara Stock Opname Fisik barang persediaan periode Semester II Tahun 2025, karena pada tahun Anggaran 2024 tidak terdapat akun belanja persediaan.

Persediaan belum Diregister Rp.0,-

C.8 Persediaan belum Diregister

Nilai Persediaan belum Diregister per Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Persediaan belum Diregister ini muncul bisa disebabkan oleh hal berikut ini: (1) Penggunaan Akun selain akun yang membentuk persediaan untuk pembelian persediaan di Modul Pembayaran di Aplikasi SAKTI, (2) Penggunaan akun pembentuk persediaan yang tepat di modul Pembayaran Aplikasi SAKTI namun belum diinput di Modul Persediaan Aplikasi SAKTI, (3) Perikaman akun persediaan di Modul Pembayaran dan Modul Persediaan tidak sama.

Tanah

Rp.0

C.9 Tanah

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki Nilai aset tetap berupa tanah per Semester II TA 2025 dan TA 2024.

Peralatan dan Mesin

Rp.3.373.826.917,-

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per Semester II TA 2025 dan TA 2024 adalah Rp. 3.373.826.917- dan Rp. 3.077.154.916. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	Rp.	3.071.883.030
Mulai tahun		
Pembelian	Rp.	-
Hilang (Hutang Bank dan others)	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk	Rp.	-
Mulai kurang		
reklasifikasi keluar	Rp.	-
Perubahan aset dan penggunaan	Rp.	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap telah digunakan	Rp.	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	3.373.826.917
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp.	(2.450.405.010)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp.	914.321.907

Peralatan dan Mesin

belum Diregister

Rp.0,-

C.11 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin belum Diregister per Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Peralatan dan Mesin belum Diregister ini muncul bisa diakibatkan oleh hal berikut ini: (1) Penggunaan Akun selain akun yang membentuk Peralatan Mesin untuk pembelian persediaan di Modul Pembayaran di Aplikasi SAKTI, (2) Penggunaan akun pembentuk Peralatan Mesin yang tepat di modul Pembayaran Aplikasi SAKTI namun belum diinput di Modul Aset Aplikasi SAKTI, (3) Perekaman akun Peralatan Mesin di Modul Pembayaran dan Modul Aset tidak sama.

Gedung dan
Bangunan
Rp0

C.12 Gedung dan Bangunan

Untuk periode 31 Desember 2025 dan TA 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki aset berupa gedung dan bangunan. Adapun Tanah beserta Gedung dan Bangunan di atasnya merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipinjam pakai ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk periode 31 Desember 2025 dan TA 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terdapat Aset Berupa Jalan Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.14 Aset Tetap Lainnya

Untuk periode 31 Desember 2025 dan TA 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terdapat Aset Berupa Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp (2.611.112.282)

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing Rp.(2.611.112.282) dan Rp(2.284.442.352). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan nilai selubung dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perakur	Acc. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Meubel	Rp 1.373.533.967	Rp 2.611.112.282	Rp 102.714.628
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	-
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	-
	Akumulasi Penyusutan	Rp 1.373.533.967	Rp 2.611.112.282	Rp 102.714.628

Tagihan TP/TGR
Rp.0,-

C.16 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Semester II TA 2023 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau lindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Semester II TA 2023 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Table 19
Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Semester II TA 2023 dan 2024

No	Katgori	Sem II TA 2023	Tahun 2024
1	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Piutang jangka
Panjang
Rp.0,-

C.17 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang jangka Panjang

Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang jangka Panjang per Semester II TA 2023 dan TA 2024. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.18 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) per Semester II TA 2023 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) yang belum diselesaikan pada tanggal Neraca Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) (Netto) adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)
TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
TGR ad	-	-
Jumlah	-	-

Aset Tak Berwujud

Rp0,-

C.19 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per Semester II TA 2025 dan TA 2024 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026 (31 Desember 2026)

Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2026	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2026	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Aset Tak Berwujud

No.	Salah	Uraian	Nilai
1	KPU/Kab. Tanjung Jabung Barat		Rp -
Jumlah			Rp -

Aset Lain-Lain Rp0,-

C.20 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per Semester II TA 2025 dan TA 2024 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo per 1 Januari 2025	Rp. 0,-
Nilai Tambah	Rp. 0,-
Penyusutan dan Aset Tetap/Pengusutan dan Pengusutan	Rp. 0,-
Nilai Rata-rata	Rp. 0,-
Pengusutan barang tetap yang di hapuskan	Rp. 0,-
Penghapusan RAN	Rp. 0,-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp. 0,-
Penyusutan Penyusutan	Rp. 0,-
Saldo Saldo per 31 Januari 2025	Rp. 0,-

Pada saldo awal tahun 2025 terdapat nilai Aset Lain-lain sebesar Rp.0,- adalah barang telah diberitikan dari penggunaan dan akan dilakukan Penghapusan jika sudah mendapat surat izin Penghapusan dari KPU Pusat, sampai dengan periode pelaporan Satker KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menerima Surat Izin penghapusan tersebut.

Akumulasi

Pengusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.-

C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Semester II TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Pengusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	T.A. 2025	T.A. 2024	Saldo
Menyusut/Pengusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.0,-

C.22 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per Semester TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	TA.2025	TA.2024
1	Tahun 2024 yang belum di Jurnal Hakik Berupa Uang Muka Bulan Desember 2024	-	Rp. 11.000.000
	Jumlah	Rp. -	Rp. 11.000.000

Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Keterangan SATKER	End II Tahun 2024
KPU Kab. Tanjung Jabung Barat	
Uang Di Bank	-
Uang Tunai	-
Uang Dalam Di GUP dan atau TUP lainnya	-
Jumlah	-

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp.0,-

C.24 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang belum Ditagihkan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan SPBY atau Kuitansi yang sudah dibayar oleh bendahara Pengeluaran namun belum di mintakan Ganti Uang persediaannya (GUP) ke KPPN.

Ekuitas
Rp. 762.714.635,-

C. 25 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih unitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.762.714.635,- dan Rp.7.741.258.221,-

Pendapatan PNBIP
Rp0,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)-LO pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan PNBIP-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNBIP karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara.

Tabel 23
Rincian Pendapatan PNBIP-LO TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Nak (Tamat) %
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai Rp
3.761.399.816,-

D.2 Beban Pegawai

Beban pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.761.399.816,- dan RP. 2.888.052.057,-.

Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 24
Rincian Beban Pegawai pada Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Saldo (Turnor) %
Beban Uang Pokok PNS/PPK	1.175.853.350	842.188.709	39,32
Beban Uang Mula PNS/PPK	1.1.112	4.645	39,32
Beban Tunj. Seseorang PNS/PPK	82.802.325	44.001.000	29,35
Beban Tunj. Anak PNS/PPK	24.970.543	20.643.815	21,00
Beban Tunj. Insuransi PNS/PPK	40.320.000	40.320.000	-
Beban Tunj. PTH PNS/PPK	61.177.105	5.029.542	1,14,36
Beban Tunj. Gaji PNS/PPK	87.143.000	46.173.180	36,65
Beban Uang Makan PNS/PPK	219.636.550	120.267.510	52,50
Beban Tunjangan Umum PNS	26.010.000	23.281.000	54,82
Beban Uang Kefasutan	827.810.000	642.035.500	77,71
Beban Tunjangan-Fungsional PNS/PPK	52.200.000	27.000.000	-
Beban Uang Lembat	16.200.000	-	-
Beban Tunjangan Khusus PNS/PPK	1.150.038.341	852.037.264	36,18
Pengembalian Biaya Pegawai			-
Jumlah	3.741.335.818	2.866.683.887	60,33

Beban Persediaan Rp.

0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 25
Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Saldo (Turnor) %
Beban Persediaan Barang Suku	-	-	-
Beban Persediaan produk/jasa lainnya	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Barang dan Jasa

Rp 2.127.621.556,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban jasa per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 2.127.621.556,- dan Rp. 19.319.371.787,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per Semester II TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Beban Barang dan Jasa
Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	SMTR I TH 2025	SMTR II TH 2024	persentase %
Beban Perjalanan Dinas	85.315.543	84.780.744	(11,21)
Beban Perjalanan Kerja (Jasa Pos-Pos)	576.693	0	0,00
Beban Honor Operasional Staf dan Perja	58.800.000	86.127.300	(10,19)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	40.860.000	0,00
Beban Barang Operasional: Penanganan COVID-19	0	0	0,00
Beban Bahan	250.309.915	5.470.132.023	(55,36)
Beban Honor Output Kegiatan	1.225.960.000	21.840.054.000	(10,04,91)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	185.087.720	6.064.887.267	(48,5,82)
Beban Barang Non Operasional Penanganan COVID-19	0	0	0,00
Beban Langganan Listrik	48.663.807	54.770.790	0,00
Beban Langganan Telekom	0	0	0,00
Beban Langganan Air	2.400.000	800.000	2,00
Beban Jasa Konsultasi	0	0	0,00
Beban Perawatan dan Pemeliharaan	7.500.000	0	0,00
Beban Sewa	200.500.000	473.380.800	(10,1,77)
Beban Jasa Profesi	1.400.000	1.800.000	(1,1,80)
Beban jasa Lainnya	60.486.275	2.778.273.786	(10,1,11)
Beban jasa : Penanganan Covid-19	0	0	0,00
Jumlah	2.127.621.556	19.319.371.787	(10,1,11)

Beban Pemeliharaan
Rp.48.165.039,-

12.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.48.165.039,- dan Rp. 60.613.646,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	Semb II 2025	Semb I 2024	Rasio (Persen %)
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	11.740.000	38.298.000	72,87
Beban Pemeliharaan Perawatan & Mesin	38.405.039	21.317.646	79,77
Beban Pemeliharaan Jembatan	-	-	-
Beban Pemeliharaan bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	48.165.039	60.613.646	79,54

Beban Perjalanan
Dinas Rp
365.927.739,-

12.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.365.927.739,- dan Rp. 3.004.614.256,-. Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN/LEMB. BEBAN	TA 2025	TA 2024
Beban Perjalanan Dinas	263.874.559	1.416.345.305
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.751.180	887.000.720
Beban Perjalanan Dinas Luar Kota	91.302.000	719.359.075
Beban Perjalanan Dinas Luar Kota	-	0
Jumlah	365.927.739	3.004.614.256

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	SEM II TA 2025	SEM II TA 2024	Nilai (Tribun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pondok	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Meubel untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pondok	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pondok	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial
Rp 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bencana selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Beban Bantuan Sosial
Semester II TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Sem II TA 2025	Sem II TA 2024	Rak (Tunai) %
Beban Bantuan untuk Ketahanan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
326.669.930,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.326.669.930,- dan Rp. 287.785.189,-.

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Rak (Tunai) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	326.669.930	287.785.189	13,51
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Jangkar & Jembatan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Jumlah	326.669.930	287.785.189	13,51

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran

berjalan. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Sel 1 TH 2025	Sel 1 TH 2024	RUR (RUPAH) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Lain-lain Rp.0) - D.11. Beban Lain-lain

Beban lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori dari D1 s/d D10.

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp.429.101.132,-

D.12 Kegiatan Non Operasional/ Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 429.101.132,- dan Rp. 118.289.406,- terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Kegiatan Non Operasional
Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	429.101.132	118.289.406
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Surplus(Defisit) Kegiatan Non Operasional lainnya	429.101.132	118.289.406

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya tidak ada.

Pos Luar Biasa Rp.0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Pos Luar Biasa
Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	Sem II TA 2025	Sem II TA 2024	Nilai (Persen) %
Pos Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS PO&POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp

7.729.398.671,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal per tanggal 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.7.729.398.671,- dan Rp. 26.669.084.526,-

Surplus/(defisit) LO

Rp.(6.200.682.948,-)

E. 2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk periode 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. (6.200.682.948,-) dan Rp. (47.861.442.266,-).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir periode 31 Desember 2025 dan periode 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp.0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp.0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan periode 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Nilai Persediaan Semester II TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Buku Cadang	-
3. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp. 0

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi merupakan hasil reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi keluar yang dihasilkan oleh aplikasi sehingga nilai dari Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp.0

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non Revaluasi

Rp.0

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir Semester 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 36
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Resolusi
Semester II TA 2025 dan 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Lain-Lain
Rp (4.660.263.493)

E.3.7 Lain-lain

Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (4.660.263.493),- dan Rp. 0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp 3.894.282.405,-

F. 4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk per Semester II TA 2025 dan per Semester II TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3.894.282.405,- dan Rp. 28.921.756.411,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KI, antar KI, antar BUN maupun KI dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 37
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.894.282.405
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Penghasilan Hibah Langsung	-
Penghasilan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.894.282.405

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KI yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp.0,- sedangkan DDEL sebesar Rp.0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk/Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0. Sedangkan Transfer Masuk/Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal Semester I TA 2025 adalah Rp.4.660.263.493,- dan pengembalian ke Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Tanggal 9 April 2025.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 762.714.635,- dan Rp. 7.729.398.671,-.

P. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

P.1 KIJADIAN-KIJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada saat penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan aplikasi SAKTI dan Monitoring MONSAKIT.

Pada akhir periode pencatatan pelaporan 31 Desember 2025 pada satker KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan pelaporan ini sebarangnya BMN tersebut yang masuk Kategori Aset Lain-Lain dan tidak berubah dari Saldo Awal Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- dengan Nilai Periode Pelaporan 31 Desember 2024 dikarenakan belum terbitnya Surat Iain Penghapusan BMN dari KPU RI.

P.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat PT. BANK RAKYAT INDONESIA 1946 (Persero) Cabang Kuala Tungkal Nomor Rekening 652726564431000 a.n. BPC 143 KPU KAB TANJAB BARAT yang masih aktif/digunakan sampai dengan sekarang.

P.3 PENGELOLAAN KEUANGAN, PEGAWAI DAN KANTOR KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01/KL.032/1506/2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran Pelaksanaan Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPML dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sutrisno, S.Pd, S.AP
PPK	: Sarwani, S.E
PISPM	: Nita Zakia, S.E
Bendahara Pengeluaran	: Jumiyati, S.M
Bendahara Pengeluaran Pembantu	: Muhammad Satriu, S.M
Perigelola Keuangan	: Andrews Ardanita, A.Md
Pengelola Keuangan	: Fatmahan, SE

E4 PENGUNGKAPAN LAINNYA

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 ada hal-hal yang perlu diungkap diantaranya :

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan sekarang belum memiliki Aset berupa Bangunan Gedung Kantor, sedangkan Gedung Kantor yang digunakan sekarang merupakan Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 04 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris KPU
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



NIP. 19700619-199702-1-001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : (476) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (91) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1866) JAMBI
 SATUAN KERJA : (658443) KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/26 12:27 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_sukur_komparatif_pos

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Simpanan Kas	0	6,746,545,657	(6,746,545,657)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	202,500,000	(202,500,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	6,949,045,657	(6,949,045,657)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,373,306,917	3,077,154,916	296,152,001	9.64
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,611,112,261)	(2,288,442,357)	(322,669,904)	14.30
JUMLAH ASET TETAP	762,194,656	792,712,564	(29,517,908)	(3.73)
ASET LAINNYA				
Aset Lainnya	0	444,414,104	(444,414,104)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(444,414,104)	444,414,104	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	762,194,656	7,741,258,221	(6,979,063,565)	(90.15)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	11,839,330	(11,839,330)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	11,839,330	(11,839,330)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	11,839,330	(11,839,330)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Modal	762,194,656	7,729,398,871	(6,967,204,215)	(90.13)
JUMLAH EKUITAS	762,194,656	7,729,398,871	(6,967,204,215)	(90.13)
JUMLAH EKUITAS	762,194,656	7,729,398,871	(6,967,204,215)	(90.13)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	762,194,656	7,741,258,221	(6,979,063,565)	(90.19)

Keterangan :
 0 (NILAI)



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : (075) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (000443) KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tgl Data : 04/05/25 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/25 12:05 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Pembiayaan dan Meas	1,373,626,913	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Perabotan dan Meas	0	2,811,112,202
0.0	212111	Diagnosa ke Entitas Lain	0	4,067,361,537
0.0	212121	Diagnosa dan Entitas Lain	173,928,152	0
0.0	261111	Ekuitas	0	7,726,368,671
0.0	261116	Kontribusi Lainnya	4,060,361,483	0
1.0	402126	Pendapatan dan Penerimaan Monev BAKS Lainnya	0	114,664,300
1.0	402673	Penerimaan Kembali Balaia Barang, Takori Anggapan Yang Lain	0	68,164,333
1.0	464226	Pendapatan Pembiayaan Aset Lainnya	0	258,072,668
1.0	511111	Saluran Gaji Pokok PNS	789,644,320	0
1.0	511116	Saluran Pembuktian Gaji PNS	0,000	0
1.0	511121	Saluran Tunj. Sumbangan PNS	59,148,000	0
1.0	511122	Saluran Tunj. Anak PNS	20,361,556	0
1.0	511123	Saluran Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
1.0	511126	Saluran Tunj. PPh PNS	61,177,706	0
1.0	511128	Saluran Tunj. Biaya PNS	46,131,540	0
1.0	511129	Saluran Uang Makan PNS	136,800,000	0
1.0	511131	Saluran Tunjangan Umum PNS	39,700,000	0
1.0	511132	Saluran Uang Kehormatan Pejabat Inggres	627,810,000	0
1.0	511811	Saluran Gaji Pokok PPPK	403,961,030	0
1.0	511816	Saluran Pembuktian Gaji PPPK	0,000	0
1.0	511821	Saluran Tunjangan Sumbangan PPPK	23,620,000	0
1.0	511822	Saluran Tunjangan Anak PPPK	4,590,657	0
1.0	511824	Saluran Tunjangan Fungsional PPPK	53,280,000	0
1.0	511825	Saluran Tunjangan Biaya PPPK	21,062,150	0
1.0	511829	Saluran Uang Makan PPPK	89,620,000	0
1.0	511831	Saluran Tunjangan Umum PPPK	0,000,000	0
1.0	512011	Saluran Uang Lembur	12,895,000	0
1.0	512012	Saluran Uang Lembur PPPK	2,370,000	0
1.0	512411	Saluran Pegawai (Tunjangan Khusus/Kepala/Khusus)	753,480,823	0
1.0	512414	Saluran Pegawai Tunjangan Khusus/Kepala/Khusus PPPK	406,177,716	0
1.0	521111	Saluran Kebutuhan Perencanaan	66,711,343	0
1.0	521114	Saluran Pengiriman Surat Dinas Pjs Pusat	171,000	0
1.0	521115	Saluran Honor Operasional Saluran Kaps	66,800,000	0
1.0	521311	Saluran Saluran	258,331,916	0
1.0	521313	Saluran Honor Output Kegiatan	1,223,950,000	0
1.0	521316	Saluran Barang Non Operasional Lainnya	185,687,722	0
1.0	521320	Saluran Perbaikan dan Meas - Eksternalisasi	7,200,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : (079) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (000443) KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tgl Data : 04/05/20 7:30 AM

Tgl Cetak : 04/05/20 12:05 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_pku

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langgahan Listrik	48.653,300	0
3.0	522112	Beban Langgahan Air	2.450,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	202.000,000	0
3.0	522181	Beban Jasa Profesi	1.400,000	0
3.0	522182	Beban Jasa Lainnya	82.408,275	0
3.0	525111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.700,000	0
3.0	525121	Beban Pemeliharaan Perakutan dan Mesin	38.400,000	0
3.0	526111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	203.374,358	0
3.0	526112	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.758,186	0
3.0	526114	Beban Perjalanan Dinas Polar Meeting/Dinas Kota	91.380,000	0
3.0	526115	Beban Perjalanan Perakutan dan Mesin	108.680,000	0
Jumlah			14.838.903,622	14.838.903,622

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA ANGGARA : (078) KOMISI PEMERINTAH UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMERINTAH UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1008) JAMBI

SATUAN KERJA : (00040) KPU KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT

Tgl Data : 04/10/25 9:37 AM

Tgl Cetak : 04/10/25 11:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_pku

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	SETORAN KE ENTITAS LAIN	0	6.163.073.701
0.0	313171	SETORAN DARI ENTITAS LAIN	173.323.732	0
3.0	425420	Pendapatan dan Penerimaan Lainnya	0	114.864.800
3.0	425810	Penerimaan Kembali Saluran Bantu Tahun Anggaran Yang Lelu	0	58.364.332
3.0	511111	Saluran Gaji Pokok PNS	789.844.328	0
3.0	511119	Saluran Pembayaran Gaji PNS	8.304	0
3.0	511121	Saluran Tunj. Seseorang PNS	35.142.060	0
3.0	511122	Saluran Tunj. Anak PNS	36.387.888	0
3.0	511123	Saluran Tunj. Struktur PNS	48.322.800	0
3.0	511125	Saluran Tunj. PPh PNS	41.177.088	0
3.0	511126	Saluran Tunj. Seseorang PNS	46.127.548	0
3.0	511129	Saluran Uang Makan PNS	143.324.888	0
3.0	511131	Saluran Tunjangan Umum PNS	29.750.888	0
3.0	511132	Saluran Uang Kehormatan Pejabat Negara	827.191.888	0
3.0	511611	Saluran Gaji Pokok PPPK	483.961.888	0
3.0	511619	Saluran Pembayaran Gaji PPPK	4.000	0
3.0	511621	Saluran Tunjangan Seseorang PPPK	21.207.888	0
3.0	511622	Saluran Tunjangan Anak PPPK	4.387.888	0
3.0	511624	Saluran Tunjangan Fungsional PPPK	33.380.888	0
3.0	511625	Saluran Tunjangan Seseorang PPPK	21.382.156	0
3.0	511626	Saluran Uang Makan PPPK	46.333.888	0
3.0	511630	Saluran Tunjangan Umum PPPK	4.388.888	0
3.0	512211	Saluran Uang Lembur	12.000.000	0
3.0	512212	Saluran Uang Lembur PPPK	2.375.000	0
3.0	512413	Saluran Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	753.480.888	0
3.0	512414	Saluran Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	498.077.708	0
3.0	521111	Saluran Kebutuhan Perkantoran	35.743.340	0
3.0	521114	Saluran Pengiriman Surat Dinas Pos Kurat	178.888	0
3.0	521115	Saluran Biaya Operasional Satuan Kerja	58.888.888	0
3.0	521211	Saluran Bahan	267.034.340	0
3.0	521213	Saluran Biaya Denda Kegiatan	1.221.988.888	0
3.0	521216	Saluran Biaya Non Operasional Lainnya	268.788.888	0
3.0	521311	Saluran Langganan Listrik	48.000.000	0
3.0	521315	Saluran Langganan Air	2.400.000	0
3.0	521411	Saluran Jasa Pribadi	1.400.000	0
3.0	521414	Saluran Jasa Lainnya	82.400.000	0
3.0	521415	Saluran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.900.000	0
3.0	521416	Saluran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.400.000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (978) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (91) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
 SATUAN KERJA : (600443) KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tgl Data : 04/05/2025 9:57 AM
 Tgl Cetak : 04/05/2025 11:58 AM
 Halaman : 2
 lrp_neraca_perkiraan_kas_satker.doc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	380,700,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,001,140	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,302,000	0
3.0	524115	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	48,100,000	0
3.1	511103	Pengembalian Belanja Perawatan Cag Kab	0	14
3.1	511108	Pengembalian Belanja Uang Makan PKB	0	200,000
3.1	511311	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,500,000
3.1	511316	Pengembalian Belanja Barang Kori Operational Lainnya	0	25,000,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0,000,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,000,000
JUMLAH			6,356,242,575	6,356,242,575

Keterangan :
 Rincil



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (075) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) JAMBI
 SATUAN KERJA : (856443) KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tgl Cetak : 04/05/26 07:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/26 11:57 AM
 Halaman : 1
 bp_lo_cetak_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	269.758.058	(269.758.058)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	269.758.058	(269.758.058)	(100)
PENDAPATAN Hibah	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	269.758.058	(269.758.058)	(100)
BELANJA OPERASIONAL	0	0	0	
Belanja Pegawai	3.791.380.818	2.846.052.667	945.347.758	30.33
Belanja Pemeliharaan	0	2.091.052.786	(2.091.052.786)	(100)
Belanja Barang dan Jasa	2.127.821.554	39.319.371.783	(37.191.550.229)	(84.585)
Belanja Pemeliharaan	48.183.024	61.613.646	(13.430.622)	(20.534)
Belanja Perjalanan Dinas	305.927.738	3.094.614.256	(2.688.686.517)	(87.321)
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Masyarakat	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (075) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1003) JAMBI
 SATUAN KERJA : (655443) KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tgl Dlm : 04/05/25 7:27 AM
 Tgl Cetak : 04/05/25 11:57 AM
 Halaman : 2
 bp_lo_sakuw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pendapatan Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penghasilan dan Amortisasi	329,989,330	347,795,189	38,804,741	11,912
Beban Penyusutan Pusing Tak Terlagi	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH SESAJI	8,629,794,080	40,249,489,730	(41,819,715,950)	(50,250)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,629,794,080)	(40,249,731,472)	41,549,547,592	(50,192)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelaksanaan Aset	114,564,800	368,300	114,296,500	31,033,532
Pendapatan Pelaksanaan Aset	114,564,800	368,300	114,296,500	31,033,532
Beban Pelaksanaan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelidikan Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelidikan Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelidikan Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	114,428,332	117,921,196	198,519,229	166,85
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	114,428,332	122,666,196	191,748,229	168,289
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,747,999	(4,757,937)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	429,101,132	118,389,496	310,811,726	262,795
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,200,692,948)	(40,131,442,266)	41,932,735,318	(57,041)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT : LO	(8,200,692,948)	(40,131,442,266)	41,932,735,318	(57,041)

Keterangan :

FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
 SATUAN KERJA : (000443) KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tgl Data : 04/03/26 9:37 AM
 Tgl Cetak : 04/03/26 11:56 AM
 Halaman : 1
 lpr_jkb_saktar_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,723,398,671	26,669,684,524	(18,946,285,853)	(71.02)
SURPLUS/DEFISIT LO	(8,792,682,948)	(47,001,442,264)	41,668,759,316	(87.04)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4,888,263,493)	0	(4,888,263,493)	0
PENYESUAIAN NILAI ASSET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASSET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	(4,888,263,493)	0	(4,888,263,493)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,894,302,405	24,521,756,411	(25,027,454,006)	(88.54)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,966,584,036)	(18,939,685,855)	11,973,001,819	(63.22)
EKUITAS AKHIR	762,714,635	7,723,398,671	(6,960,684,036)	(90.12)

Keterangan :

FINAL



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 878 KEMDI PERLINDUNG UMUM
ESELON I : 81 KEMDI PERLINDUNG UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 1800 JAWAB
SATUAN KERJA : 858443 KPU KABUPATEN TAILUNG JABUNG BARAT
JENIS SATUAN KERJA : 80

Kode Lap : LRA.B.5.2
Tanggal : 04/02/2024 12:11 PM
Halaman : 1
Pag ID : 000_P8_000_0000_0000_0000
Tgl Data : 4/5/2024 8:02 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENYEMBAIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4/7	9=4-7
51	BELANJA PECAKOK							
511	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	100.040.000	769.040.000	769.040.320	0	769.040.320	100	600
511110	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.000	10.000	0.000	14	0.000	00.00	710
511121	Belanja Tunj. Suasana PNS	58.172.000	50.140.000	50.140.000	0	50.140.000	100	940
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20.013.000	20.388.000	20.387.880	0	20.387.880	100	114
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000	40.320.000	40.320.000	0	40.320.000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5.104.000	81.178.000	81.177.100	0	81.177.100	100	890
511126	Belanja Tunj. Biaya PNS	43.997.000	48.137.000	48.131.540	0	48.131.540	99.99	5.460
511129	Belanja Uang Makan PNS	129.404.000	142.044.000	142.034.000	210.900	141.823.100	99.78	1.030.000
511181	Belanja Tunjangan Umum PNS	23.270.000	28.790.000	28.790.000	0	28.790.000	100	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5111	581.388.000	1.189.822.000	1.189.822.310	210.914	1.189.611.397	99.97	1.041.000
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	827.360.000	827.660.000	827.610.000	0	827.610.000	99.99	74.000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5112	827.360.000	827.660.000	827.610.000	0	827.610.000	99.99	74.000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	140.180.000	403.900.000	403.891.000	0	403.891.000	100	900
511610	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000	5.000	4.000	0	4.000	80.00	900
511621	Belanja Tunjangan Suasana PPPK	7.344.000	28.521.000	23.520.880	0	23.520.880	100	130
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	737.000	4.591.000	4.590.827	0	4.590.827	99.99	173
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27.000.000	50.280.000	50.280.000	0	50.280.000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Biaya PPPK	6.110.000	21.062.000	21.062.150	0	21.062.150	100	850
511628	Belanja Uang Makan PPPK	22.004.000	80.028.000	80.003.000	0	80.003.000	99.99	370.000
511630	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	100	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5116	203.490.000	602.781.000	602.401.724	0	602.401.724	99.94	379.276
5122	Belanja Lain-lain							
512211	Belanja Uang Lain-lain	15.000.000	13.000.000	12.830.000	0	12.830.000	98.75	160.000
512212	Belanja Uang Lain-lain PPPK	0	2.500.000	2.370.000	0	2.370.000	94.80	130.000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5122	15.000.000	15.500.000	15.200.000	0	15.200.000	96.73	290.000
5124	Belanja Tdk Khusus & Belanja Pegawai Tunjangan							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kepala/Kantor)	887.120.000	763.400.000	763.480.820	0	763.480.820	100	9.377
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kepala/Kantor PPPK	110.300.000	406.178.000	406.177.710	0	406.177.710	100	122
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5124	997.420.000	1.169.578.000	1.169.658.530	0	1.169.658.530	100	6.655

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESKELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 078
: 01
: 1000
: 606403
: KII

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAMBI
KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode Lap : URA.B.5.2
Tanggal : 04/05/2025 12:11 PM
Halaman : 2
Pg ID : 00p_jra_3rd_skrn_kabkot_poc
Tgl Dpt : 4/5/2025 8:03 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2.752.705.000	3.775.257.000	3.775.257.000	250.914	3.775.256.086	95,35	1.707.434
52	BELANJA STRANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Reperasi Perawatan	38.200.000	55.585.000	55.511.343	0	55.511.343	95,34	355.657
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600.000	600.000	178.300	0	178.300	29,83	421.700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31.400.000	62.840.000	58.800.000	0	58.800.000	93,87	4.040.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63.200.000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	133.400.000	119.025.000	114.290.243	0	114.290.243	85,34	4.716.707
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	263.825.000	261.888.915	3.936.085	259.952.830	95,47	3.405.065
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1.223.950.000	1.223.950.000	0	1.223.950.000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	206.121.000	206.756.550	23.694.806	183.061.744	90,51	24.059.256
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	1.493.896.000	1.492.595.465	38.630.891	1.453.964.574	95,38	27.516.383
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	30.000.000	40.025.000	46.653.357	0	46.653.357	95,24	371.643
522113	Belanja Langganan Air	3.000.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	100	0
522191	Belanja Jasa Profesi	0	3.201.000	1.400.000	0	1.400.000	43,74	1.801.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	34.000.000	62.935.000	62.498.275	0	62.498.275	96,88	431.725
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	67.000.000	108.561.000	113.951.632	0	113.951.632	98,11	2.634.368
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.900.000	12.450.000	11.760.000	0	11.760.000	94,46	690.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.900.000	38.051.000	36.405.000	0	36.405.000	95,87	1.646.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	85.800.000	50.501.000	48.165.000	0	48.165.000	95,37	2.336.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.900.000	275.168.000	263.584.550	1.715.000	261.869.550	95,89	11.313.441
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	12.610.000	12.601.780	2.058.000	10.543.780	83,60	2.066.220
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	91.310.000	91.302.000	0	91.302.000	99,99	8.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	8.900.000	379.088.000	367.488.330	3.773.000	363.715.330	98,47	13.380.261
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	243.870.000	2.362.270.000	2.361.841.158	38.630.891	2.323.210.267	97,86	53.565.870
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	46.788.000	46.700.000	0	46.700.000	98,41	1.487.999
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	46.788.000	46.700.000	0	46.700.000	98,41	1.487.999

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KEMISI PERSELNAN UMUM
 ESEKON : 01 KEMISI PERSELNAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 1091 JAMBI
 SATUAN KERJA : 000443 KPU KABUPATEN TAILUNG JABUNG BARAT
 JENIS SATUAN KERJA : NO

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 04/05/2024 12:11 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : 160_190_1st_dkwn_saktar_pos
 Tpr Date : 4/5/2024 8:25 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENJEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4/7	9=4-7
	Jumlah Kelompok Belanja 53	0	29.766.110	48.760.000	0	48.760.000	163,81	1.687.890
	Jumlah Belanja	3.056.478,000	8.207.115,000	5.183.213,440	30.131.740	6.166,673,720	39,13	54.641,289

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KOMITERANGANLEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM DTS
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 050441

Tgl Cetak : 04/10/25 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/10/25 12:10 PM
Halaman : 1
No_La_Side_Splitter_New_2025

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Pendapatan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pendapatan Pembiayaan Negara Bukan Pajak	0	173,029,133	173,029,133	0	0	270,126,464	(270,126,464)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kegiatan Negara Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Pembiayaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	173,029,133	173,029,133	0	0	270,126,464	(270,126,464)	0
II. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A) + A.I + A.II	0	173,029,133	173,029,133	0	0	270,126,464	(270,126,464)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,207,115,000	6,153,073,701	(54,041,299)	99	47,889,728,000	47,783,334,511	(406,393,489)	99
1. Belanja Pegawai	3,775,057,000	3,771,259,366	(3,797,634)	100	2,062,706,000	2,051,394,507	(11,311,493)	99
2. Belanja Barang	2,352,071,000	2,331,714,330	(20,356,670)	99	44,519,448,000	44,134,629,294	(384,818,706)	99
3. Belanja Modal	40,787,000	41,100,005	313,005	99	287,173,000	287,570,710	397,710	100
4. Belanja Pembiayaan Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
ESKELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN TANJUNG BARAT 406443

Tgl Data : 04/05/2024 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/2024 12:10 PM
Halaman : 2
lap_rls_satuker_satuker_pem_2023

URAIAN	2023				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWA) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWA) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Task	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Task	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kapada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B1 + B2)	8,267,113,000	8,133,673,761	(54,641,238)	99	47,883,725,000	47,383,594,511	(499,130,489)	99
C. PEMBAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

